

Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Di Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022

Strategy for Achieving Key Performance Indicators at the Samarinda City Youth, Sports, and Tourism Office in 2022

Fakhir Muharram Syahar¹, Muhammad Noor²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 03

Page : 311-320

Published : 2026

KEYWORDS

Achievement Strategy, Key Performance Indicators (KPIs), Sports Achievement, Disporapar.

CORRESPONDENCE

Phone: +6281238557704

E-mail: fakhirmuharram22@gmail.com

ABSTRACT

This study employs a qualitative approach aimed at describing, explaining, and analyzing the strategies implemented by the Samarinda City Disporapar in achieving the established KPIs. The research focuses on the strategies used to improve sports performance as well as the obstacles encountered during the implementation process. Data collection was conducted using purposive sampling. The results indicate that the process of achieving KPI point 2 has been carried out fairly well. The Samarinda City Disporapar, in collaboration with relevant stakeholders, successfully implemented several key strategies, including: (1) coaching and development of educational sports at various levels of education, (2) optimization of talent identification and athlete development, (3) optimization of the use of sports facilities and infrastructure, (4) organization of district/city-level sports championships, and (5) development of competitive sports at the provincial level. These efforts are evidenced by Samarinda City's achievement as overall champion in POPDA XVI 2022 in Paser Regency and PORPROV VII 2022 in Berau Regency. However, the study also identifies several challenges in achieving the KPIs, particularly limited budget allocation and inadequate sports facilities and infrastructure, which negatively affect athlete training programs and the implementation of sports activities.

Keywords: *Achievement Strategy, Key Performance Indicators (KPIs), Sports Achievement, Disporapar.*

INTRODUCTION

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menuntut adanya pengelolaan kinerja yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengukuran kinerja instansi pemerintah menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah. IKU tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian IKU sangat ditentukan oleh strategi yang tepat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta ketersediaan sumber daya yang memadai.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Salah satu sasaran utama dalam IKU Disporapar adalah meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Capaian prestasi olahraga tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembinaan atlet, tetapi juga menjadi indikator kualitas sumber daya manusia serta efektivitas kebijakan olahraga daerah. Pada tahun 2022, Kota Samarinda menunjukkan capaian prestasi yang signifikan dengan meraih juara umum pada ajang POPDA XVI dan PORPROV VII Kalimantan Timur.

Meskipun demikian, pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Disporapar Kota Samarinda dalam mencapai IKU, khususnya pada sasaran peningkatan prestasi olahraga, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan manajemen kinerja sektor olahraga di tingkat daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda pada tahun 2022, khususnya pada IKU poin kedua mengenai peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan meninjau strategi yang diterapkan melalui beberapa aspek utama, meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, optimalisasi pembibitan dan pengembangan atlet, pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, serta pembinaan olahraga prestasi tingkat provinsi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pencapaian IKU tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas strategi Disporapar Kota Samarinda dalam meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kajian mengenai Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai konteks wilayah dan pendekatan yang beragam. Setiap penelitian memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang indikator kinerja, namun juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi dan tantangan di masing-masing daerah.

Penelitian oleh Prahastuti (2022) mengenai Analisis pencapaian target indikator kinerja utama dinas bina marga dan bina konstruksi provinsi Lampung tahun 2020 menemukan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan sangat baik. Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencapai target IKU, khususnya pada indikator kemandirian jalan provinsi yang mencapai 96,26%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung 2019–2024. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan kinerja yang terukur dan berorientasi pada indikator strategis mampu mendorong pencapaian kinerja instansi pemerintah secara optimal.

Selanjutnya, penelitian oleh Putri, Aulia Rahmi (2018) mengenai Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menemukan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Implementasi program kerja yang berbasis IKU mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui pelaksanaan Program UPPK yang berkontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, dan pengembangan usaha produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan IKU yang terstruktur dan berorientasi pada hasil dapat meningkatkan efektivitas program serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Selanjutnya, penelitian oleh Abdul Halik (2019) mengenai Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) menemukan bahwa belum adanya rumusan IKU yang baku dan formal menjadi kendala utama dalam pengukuran kinerja instansi PTSP. Melalui kajian ini, peneliti berhasil merumuskan sejumlah dimensi dan komponen kinerja utama yang relevan, meliputi kualitas struktur dan kewenangan, kualitas prosedur operasional pelayanan, kualitas proses perizinan, tingkat kepuasan pelayanan, serta dampak ekonomi berupa perubahan investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan tersebut menegaskan pentingnya penetapan IKU yang komprehensif dan terstandarisasi sebagai dasar evaluasi kinerja PTSP, serta menjadi referensi strategis bagi pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja instansi pelayanan publik.

Selanjutnya, penelitian oleh Yoesdiarti et al. (2022) mengenai Strategi Pengembangan Program Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka Peningkatan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi menemukan bahwa pelaksanaan program MBKM memerlukan strategi pengembangan yang berbasis pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Djuanda memiliki potensi internal yang cukup kuat untuk mendukung implementasi MBKM, namun masih menghadapi sejumlah kendala

dalam aspek kesiapan sumber daya dan tata kelola. Temuan ini menegaskan bahwa perumusan strategi yang tepat dan terarah sangat berpengaruh terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi, khususnya dalam mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa serta optimalisasi program pembelajaran berbasis kebijakan nasional.

Sementara itu, Penelitian oleh Mayuni (2021) mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Masa Pandemi menemukan bahwa Dinas Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan program pelatihan kerja meskipun berada dalam kondisi pandemi. Pelaksanaan pelatihan kerja tetap berjalan dengan menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya sejumlah kendala, terutama keterbatasan kondisi lapangan dan penyesuaian teknis pelaksanaan, yang memengaruhi efektivitas program. Temuan ini menunjukkan bahwa peran aktif dan adaptif instansi pemerintah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program berbasis IKU dalam situasi krisis.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki peran strategis sebagai instrumen pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam berbagai sektor, baik infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan tinggi, ketenagakerjaan, maupun pengembangan olahraga. Permasalahan yang umum ditemukan berkaitan dengan belum optimalnya perumusan dan implementasi IKU, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan IKU yang terstruktur, terukur, dan didukung strategi yang tepat mampu mendorong peningkatan capaian kinerja instansi secara signifikan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam menganalisis strategi pencapaian IKU, khususnya pada sektor olahraga di Kota Samarinda, guna memperkuat efektivitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap strategi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang olahraga yang dianalisis secara mendalam melalui pendekatan manajemen kinerja sektor publik pada tingkat pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada pengukuran capaian IKU atau evaluasi kinerja secara normatif, penelitian ini menekankan analisis implementatif terhadap strategi konkret yang dijalankan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi praktik strategis, pola pembinaan, serta mekanisme koordinasi dengan stakeholder yang secara langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja.

Dengan demikian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu menjadi dasar argumentatif bahwa pencapaian IKU tidak hanya ditentukan oleh penetapan indikator semata, tetapi sangat bergantung pada efektivitas strategi pelaksanaan, dukungan sumber daya, dan sinergi kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembinaan olahraga daerah yang berorientasi pada kinerja, berkelanjutan, dan akuntabel, khususnya dalam konteks peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda tahun 2022. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian menuntut pemahaman kontekstual terhadap proses, kebijakan, dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, meliputi pejabat dan staf Disporapar yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program olahraga, serta perwakilan stakeholder terkait. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi, pelaksanaan program, dan kendala dalam pencapaian IKU. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan olahraga, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen perencanaan, laporan kinerja, serta data capaian prestasi olahraga.

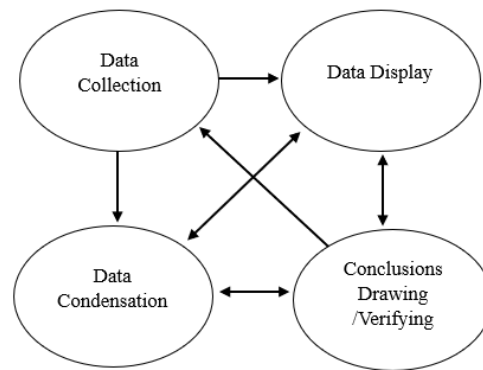
Tabel 1. Sumber Data Primer

No	Nama	Jabatan	Status
1	Andy Arifin	Sekretaris Disporapar Kota Samarinda	Key Informant
2	Hendro Atmojo	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga	Informant
3	Supriyatmono	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Informant
4	Abdul Rachman	Pelatih Cabang Olahraga Hockey	Informant
5	Subhan Ridhoni	Atlet Cabang Olahraga Futsal	Informant
6	Lexi Kristianto	Atlet Cabang Olahraga Hockey	Informant

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang terdiri dari empat tahap utama:

1. Pengumpulan Data (Data Collection) – memperoleh data dari lapangan melalui observasi dan wawancara.
2. Kondensasi Data (Data Condensation) – menyederhanakan dan memfokuskan data relevan sesuai tujuan penelitian.
3. Penyajian Data (Data Display) – mengorganisasi data dalam bentuk narasi, tabel, atau visualisasi untuk memudahkan interpretasi.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) – menguji dan menyimpulkan temuan berdasarkan bukti empiris.



Gambar 1. Komponen Analisis Data
Sumber: Google -Research Gate

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas strategi Disporapar Kota Samarinda dalam mencapai IKU bidang olahraga serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga serta peningkatan prestasi atlet sebagai bagian dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas sosial yang memiliki potensi sumber daya manusia dan olahraga yang besar. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan dan pembinaan olahraga yang terencana, berkelanjutan, serta didukung oleh kebijakan dan strategi yang efektif. Oleh karena itu, peran Disporapar menjadi sangat penting dalam mengoordinasikan program pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Kota Samarinda dilaksanakan melalui program Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) yang dikelola oleh Disporapar Kota Samarinda bekerja sama dengan KONI. Program ini membina 10 cabang olahraga prioritas dengan pola latihan terstandarisasi dan berjenjang, sejalan dengan Permenpora Nomor 43 Tahun 2012 yang menekankan pentingnya pembinaan olahraga pelajar secara terencana dan terpadu. PPLPD menjadi instrumen strategis dalam menjaring dan mengembangkan potensi atlet usia dini sebagai fondasi peningkatan prestasi olahraga daerah.

Namun, cabang olahraga di luar skema PPLPD menjalankan pembinaan secara desentralisasi oleh masing-masing induk organisasi, yang dalam praktiknya menghadapi keterbatasan pendanaan, fasilitas, dan tenaga pelatih. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pemerataan kualitas atlet dan efektivitas pembinaan olahraga secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan yang lebih inklusif serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan satuan

pendidikan guna menciptakan sistem pembinaan olahraga pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, Disporapar Kota Samarinda bersama KONI dan masing-masing cabang olahraga menerapkan pendekatan desentralisasi pada tahap awal pembinaan, di mana cabor diberi kewenangan menyusun kalender latihan mandiri sesuai prosedur yang ditetapkan, didukung dengan pelatihan pelatih dan staf berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Pembinaan ini diperkuat melalui pendampingan konsultan untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan tingkat kota, provinsi, hingga nasional, serta pemantauan atlet berprestasi secara sistematis. Strategi pemberian penghargaan berupa bonus dan insentif kepada atlet, pelatih, dan staf dilaksanakan sesuai Permenpora Nomor 8 Tahun 2020, sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas capaian prestasi. Strategi ini memiliki landasan yang kuat karena mengombinasikan pembinaan desentralisasi untuk kegiatan rutin dan sentralisasi menjelang event besar seperti PORPROV dan PON. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan distribusi dukungan belum merata di seluruh cabor, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam regenerasi atlet. Meski demikian, Disporapar tetap berkomitmen melalui penyuluhan, pelatihan, serta penyelenggaraan turnamen lokal dan regional sebagai sarana evaluasi, seleksi, dan penguatan sinergi lintas sektor dalam pembinaan olahraga daerah.

Sarana dan prasarana olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan atlet dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Disporapar Kota Samarinda telah berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan melalui kerja sama dengan KONI dan cabang olahraga dalam pengelolaan fasilitas latihan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, proses renovasi yang belum selesai, serta belum terpenuhinya standar nasional pada beberapa sarana olahraga. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas tersebut berdampak pada efektivitas pembinaan atlet dan rendahnya optimalisasi prestasi olahraga. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali kebijakan penganggaran, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan agar pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama bidang keolahragaan secara optimal dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah oleh Disporapar Kota Samarinda merupakan bagian penting dari pembinaan olahraga berjenjang yang bertujuan menjaring dan menyiapkan atlet potensial menuju level provinsi dan nasional. Kejuaraan yang diselenggarakan, baik bersifat single event maupun multi event, dilaksanakan melalui kerja sama dengan KONI dan cabang olahraga (Cabor), serta menjadi sarana seleksi dan evaluasi perkembangan atlet. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan antar-Cabor, di mana beberapa Cabor telah memiliki sistem pembinaan yang terstruktur, sementara Cabor lain masih menghadapi keterbatasan kelembagaan dan sumber daya. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelaksanaan kejuaraan dan efektivitas pembinaan atlet. Oleh karena itu, penyelenggaraan kejuaraan daerah perlu dilakukan secara lebih terstruktur, merata, dan inklusif agar mampu mendorong regenerasi atlet, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pembinaan antar-Cabor.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat provinsi di Kota Samarinda dilaksanakan secara sistematis melalui peran aktif Disporapar yang bersinergi dengan Dispora Provinsi Kalimantan Timur, KONI, serta lembaga keolahragaan lainnya. Strategi pembinaan menekankan proses berjenjang dan berkelanjutan sejak usia dini melalui pencarian bakat, pelatihan, dan

pemanfaatan pendekatan sport science. Dukungan Disporapar diwujudkan melalui penyediaan fasilitas latihan, penyelenggaraan kejuaraan sebagai sarana seleksi, serta pengembangan pelatih dan wasit. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih adanya tantangan berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kesenjangan kualitas antar cabang olahraga. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan prestasi sangat bergantung pada penguatan koordinasi antarlembaga, perencanaan jangka panjang, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan sektor olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Faktor pendukung utama dalam strategi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Disporapar Kota Samarinda adalah sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya antara Disporapar, KONI, cabang olahraga, dan stakeholder terkait, yang diperkuat oleh program pembinaan olahraga yang terstruktur. Sinergi tersebut berkontribusi positif terhadap terciptanya kondisi pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan prestasi olahraga. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai faktor penghambat utama dalam pencapaian IKU, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pembinaan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Kondisi fasilitas yang belum memadai turut memengaruhi kualitas latihan dan performa atlet dalam kejuaraan, sehingga menjadi tantangan signifikan dalam optimalisasi strategi pencapaian IKU di Disporapar Kota Samarinda.

Temuan penelitian ini menguatkan teori manajemen kinerja sektor publik yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi dan dukungan sumber daya. Implementasi strategi Disporapar Kota Samarinda menunjukkan bahwa pencapaian IKU tidak hanya bergantung pada penetapan indikator, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan program dan sinergi antar stakeholder. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi pencapaian IKU bidang olahraga di Kota Samarinda telah berjalan relatif efektif, namun masih membutuhkan perbaikan pada aspek sumber daya dan dukungan infrastruktur agar pencapaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi pencapaian indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan melihat strategi yang meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan, optimalisasi pembibitan dan pengembangan olahraga, optimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kegiatan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota, dan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat provinsi.
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan adalah strategi yang dilaksanakan oleh Disporapar sudah berjalan melalui pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar daerah (PPLPD), tetapi masih banyak Cabor yang tidak masuk dalam program PPLPD ini.
 - b. Optimalisasi pembibitan dan pengembangan olahraga, sudah berjalan dengan dua metode pembinaan dengan cara desentralisasi dalam latihan rutin dan sentralisasi menjelang kejuaraan yang akan hadapi.

- c. Optimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kegiatan olahraga, dalam pemenuhan sarana dan prasarana menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas. Banyak sarana yang belum memenuhi standar nasional atau dalam proses renovasi, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur baru.
 - d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota, dalam menyelenggarakan kejuaraan dengan berkerja sama dengan pihak lain guna mengembangkan potensi atlet melalui kompetisi dan pembinaan yang berkelanjutan. Kejuaraan seperti piala walikota hingga turnamen Tingkat lanjut menjadi ajang kompetitif dan pemangku kepentingan olahraga. Namun terdapat ketimpangan yang berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan kejuaraan dan keberhasilan pembinaan atlet secara keseluruhan.
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat provinsi, merupakan strategi dari Disporapar dengan memfasilitasi sarana latihan, penyelenggaraan kejuaraan, serta pengembangan sumber daya seperti pelatih dan wasit. Selain fokus pada pembinaan olahraga prestasi, upaya pelestarian olahraga tradisional juga dilakukan sebagai bagian dari pembinaan berbasis kearifan lokal. Pembinaan ini turut melibatkan institusi pendidikan, dengan harapan terciptanya ekosistem pembinaan olahraga yang terintegrasi dari sekolah hingga level profesional.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari strategi pencapaian indikator kinerja utama di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2022 yaitu:
- a. Faktor Pendukung
 - 1) Sinergitas yang Baik antara Semua Stakeholder
 - 2) Program Pembinaan yang Terstruktur
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Anggaran yang Terbatas
 - 2) Sarana dan Prasarana Kurang Memenuhi Syarat

REFERENSI

Buku

- Mayuni, A. (2021). Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Putri, A. R. (2012). Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota padang. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Umam, Khotibul. (2017). Pembinaan Prestasi Olahraga Bolah Basket pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman.

Dokumen-Dokumen

- Indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kota Samarinda
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Jurnal

- Alfiansyah. (2020). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan Orang. July, 1–23.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Manajemen Strategi. July, 1–23.
- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanp A Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Semarang Timur. Journal Of Public Policy And Management Review, 8(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23515>
- Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 1(1), 79–91. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34>
- Halik, A. (2014). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). Jurnal Bina Praja, 06(01), 41–50. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50>
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 9. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>
- Prahastuti, C. (2022). Analisis Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020. Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), 1(1), 2019–2022. <https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.138>
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Yoesdiarti, A., Amril, L. O., Kardaya, D., Handarini, R., & Yektyastuti, R. (2022). Strategi Pengembangan Program Pembelajaran Mbkm Dalam Tinggi Development Strategy Of Mbkm Learning Program In Djuanda University To Enhance Main Performance Indicator Of Higher Materi Dan Metode Tuliskan penelitian terdahulu dan literature review (state. Jurnal Sosial Humaniora, 13(April), 71–81.

Sumber Internet

- peraturan.bpk.go.id. 2015. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- kaltim.tribunnews.com. 2022. Update Perolehan Medali Porprov Kaltim 2022, Samarinda Puncaki Klasemen dengan Torehan 599 Medali. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2023, dari <https://kaltim.tribunnews.com/2022/12/06/update-perolehan-medali-porprov-kaltim-2022-samarinda-puncaki-klasemen-dengan-torehan-599-medali>